

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai produsen tekstil skala besar menghadapi dinamika perdagangan global yang kompleks, termasuk persaingan harga, *fragmentasi global value chains* (GVC), serta meningkatnya peran *rules of origin* (ROO) dan kebijakan non-tarif. Sektor tekstil berkontribusi signifikan terhadap ekspor nonmigas dan penyerapan tenaga kerja, sehingga perjanjian seperti PTA dan CEPA berpotensi memengaruhi struktur nilai tambah dan strategi produksi. Ketentuan seperti *Change in Tariff Heading* (CTH) dan *Regional Value Content* (RVC) menjadi penentu akses tarif preferensial dalam implementasi IT-CEPA .

Indonesia–Turkey Comprehensive Economic Partnership Agreement (IT-CEPA) merupakan instrumen diplomasi ekonomi bilateral yang bertujuan meningkatkan perdagangan, investasi, dan kerja sama lintas sektor. Sejak perundingan dimulai pada 2017, cakupannya meliputi perdagangan barang, aturan asal, fasilitasi kepabeanan, SPS, TBT, serta kerja sama investasi dan rantai pasok. Dengan fokus awal pada perdagangan barang, implementasi pada subsektor tekstil yang dipengaruhi tarif dan aturan asal dan perlu dianalisis untuk menilai dampaknya terhadap kinerja perdagangan bilateral . Negosiasi IT-CEPA mengalami penundaan akibat dinamika ekonomi global, khususnya pandemi COVID-19 yang menekan perdagangan dan mengganggu koordinasi antarnegara. Pada sektor tekstil yang sensitif terhadap permintaan global, keterlambatan

implementasi berpotensi mengurangi pemanfaatan akses pasar dan membuka peluang bagi pesaing. Oleh karena itu, ketepatan waktu dan percepatan pelaksanaan menjadi faktor krusial dalam implementasi IT-CEPA pada sektor tekstil .

Secara empiris, perdagangan tekstil global dipengaruhi perubahan permintaan, struktur GVC, dan daya saing eksportir. Turkiye memiliki keunggulan komparatif pada subsektor tekstil dan pakaian jadi, tercermin dari nilai *revealed comparative advantage* (RCA) yang relatif tinggi serta keterkaitannya dengan pasar Eropa dan Amerika. Perubahan tarif dan fluktuasi ekonomi global turut memengaruhi pola distribusi tekstil yang melibatkan Turkiye sebagai pemasok penting .

Selain tarif, produk tekstil ke Turkiye menghadapi hambatan teknis non-tarif seperti standar mutu, keselamatan, pelabelan, dan sertifikasi dalam kerangka *technical barriers to trade* (TBT). Meskipun bertujuan melindungi konsumen, regulasi ini meningkatkan biaya kepatuhan dan menjadi tantangan bagi eksportir, khususnya UMKM, akibat perbedaan standar dan kompleksitas prosedur .

Pemanfaatan preferensi tarif sering terkendala kompleksitas aturan asal dan prosedur administratif. Produk tekstil yang melalui berbagai tahapan produksi menghadapi kesulitan pemenuhan persyaratan asal, dokumen, serta prosedur kepabeanan yang memakan waktu dan biaya. Keterbatasan kapasitas administratif dan akses informasi, khususnya bagi UMKM, serta tingginya biaya dan durasi logistik turut menurunkan daya saing produk tekstil Indonesia di pasar Turkiye . Apabila *implementasi Indonesia–Turkey Comprehensive Economic Partnership Agreement* pada sektor tekstil tidak dilakukan secara efektif, terdapat risiko

kehilangan peluang pasar dan melemahnya posisi tawar Indonesia dibandingkan negara pesaing.

Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pelaku usaha, penyederhanaan prosedur perdagangan, serta perbaikan mekanisme kepabeanan dan verifikasi aturan asal menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan manfaat perjanjian. Evaluasi implementasi IT-CEPA diperlukan guna mengidentifikasi hambatan utama dan merumuskan kebijakan yang mampu menjembatani potensi akses pasar dengan realisasi ekspor Indonesia ke Turkiye .

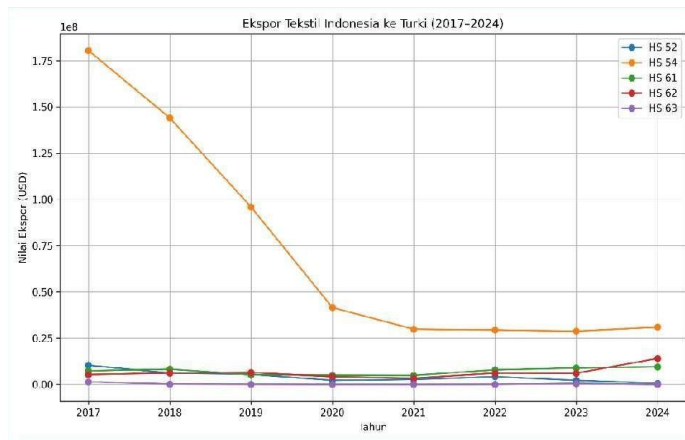
Data *UN Comtrade* menunjukkan ekspor tekstil Indonesia ke Turkiye periode 2017–2024 berfluktuasi. HS 52 mengalami penurunan struktural dari USD 10,36 juta (2017) menjadi USD 0,59 juta (2024), sedangkan HS 54 tetap menjadi kontributor terbesar meski turun signifikan pada 2020 dan stabil pada 2021–2024. Produk hilir HS 61 dan HS 62 menunjukkan pemulihan pascapandemi, sementara HS 63 relatif kecil dan cenderung menurun, mencerminkan tantangan daya saing di pasar Turkiye (UN Comtrade, 2025).

HS 54 (*filamen sintetis*) merupakan kategori dengan nilai ekspor terbesar selama periode pengamatan. Meskipun turun tajam dari USD 180,5 juta (2017) menjadi USD 41,59 juta (2020), ekspor relatif stabil pada 2021–2024 di kisaran USD 28–31 juta, menunjukkan peran berkelanjutan Indonesia dalam rantai pasok tekstil Turkiye meski pada tingkat lebih rendah (UN Comtrade, 2025).

HS 61 (pakaian rajut) dan HS 62 (pakaian woven) menunjukkan pemulihan pascapandemi. Pada 2024, ekspor pakaian rajut mencapai USD 9,53 juta,

sedangkan pakaian woven meningkat signifikan menjadi USD 14,09 juta. Tren ini mencerminkan pemulihan industri garmen Turkiye dan meningkatnya permintaan terhadap produk Indonesia (UN Comtrade, 2025).

Sebaliknya, HS 63 (produk tekstil lainnya) menunjukkan volatilitas dengan nilai ekspor relatif kecil dan menurun hingga hampir nol pada 2024. Hal ini menandakan keterbatasan daya saing Indonesia pada kategori tersebut di pasar Turkiye (UN Comtrade, 2025).



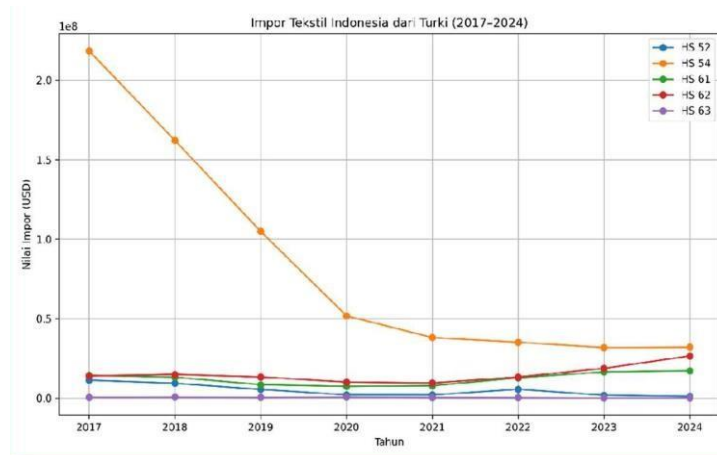
Gambar 1. 1 Grafik data ekspor tekstil Indonesia Turkiye, 2017-2024
Sumber : UN Comtrade (2025)

Data UN Comtrade menunjukkan bahwa impor Turkiye dari Indonesia periode 2017–2024 berfluktuasi mengikuti perubahan permintaan industri, pandemi COVID-19, dan penyesuaian rantai pasok global. Pada 2017, HS 54 (*filamen sintetis*) mendominasi dengan nilai di atas USD 220 juta, sementara HS 61 dan HS 62 relatif lebih kecil namun stabil, serta HS 52 dan HS 63 berada pada level rendah (UN Comtrade, 2025).

Pada tahun 2018–2020, impor menurun di hampir seluruh kategori, terutama HS 54, akibat fluktuasi harga global, peningkatan kapasitas domestik Turkiye, dan

dampak pandemi yang menekan produksi serta ekspor. Pemulihan mulai terlihat pada 2021–2022, khususnya pada HS 61 dan HS 62 seiring pulihnya industri garmen dan permintaan pasar Eropa (UN Comtrade, 2025)

Pada 2023–2024, pemulihan semakin konsisten dengan pertumbuhan produk hilir. Impor HS 61 mendekati USD 17 juta dan HS 62 sekitar USD 25 juta pada 2024, sementara HS 54 stabil di kisaran USD 32–33 juta. Pola ini menunjukkan pergeseran menuju peningkatan permintaan produk hilir dan memperkuat relevansi IT-CEPA dalam mendukung akses pasar tekstil Indonesia (UN Comtrade, 2025).



Gambar 1. 2 Grafik data impor tekstil Turkiye Indonesia, 2017-2024

Sumber : UN Comtrade (2025)

Tabel 1. 1 Data ekspor tekstil Indonesia-Turkiye tahun 2019-2023

Tahun	Amerika Serikat (US\$ juta)	Korea Selatan (US\$ juta)	Australia (US\$ juta)	Islandia (US\$ ribu)	Turki (US\$ juta)
2019	2,226.8	290.0	257.8	20.0	42.0
2020	1,717.3	260.0	240.0	10.0	38.0
2021	2,614.4	280.0	300.34	20.0	40.0
2022	3,450.0	310.0	319.93	21.0	45.0
2023	3,590.0	350.0	310.0	13.0	48.0

Sumber : UN Comtrade (2025), WITS – *World Integrated Trade Solution* (2025), ITC Trade Map – International Trade Centre (2025), BPS – Statistik Ekspor (2025); Ditjen PEN/PPI Kementerian Perdagangan (2025)

Catatan : Dirangkum oleh penulis berdasarkan sumber-sumber di atas

Meskipun ekspor tekstil Indonesia ke Turkiye relatif kecil dibandingkan mitra dagang lainnya, pasar utama Indonesia masih didominasi oleh Amerika Serikat dengan nilai ekspor sekitar USD 1,7–3,5 miliar per tahun dalam lima tahun terakhir. Korea Selatan dan Australia juga menunjukkan kinerja stabil dengan nilai masing-masing sekitar USD 260–350 juta dan USD 240–320 juta, sedangkan Islandia mencatat nilai ekspor sangat kecil akibat keterbatasan ukuran pasar dan permintaan. Dibandingkan negara lain dalam kelompok pasar potensial, Turkiye konsisten berada pada posisi terendah dengan nilai ekspor tekstil Indonesia sekitar USD 38–48 juta per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Turkiye merupakan ekonomi besar dan produsen tekstil global, akses pasar Indonesia masih terbatas akibat struktur industri yang kompetitif, belum optimalnya implementasi CEPA,

serta adanya tarif dan hambatan dagang yang relatif tinggi sebelum kerja sama preferensial (UN Comtrade, 2025).

Posisi strategis Turkiye dalam rantai pasok global menjadikannya relevan sebagai objek penelitian (*European Union*). Meskipun perundingan sejak 2017 menargetkan peningkatan perdagangan hingga USD 10 miliar, ekspor tekstil Indonesia justru menurun akibat hambatan tarif dan non-tarif. Hal ini menegaskan perlunya kajian mengenai implementasi, kendala aturan asal, dan kebijakan proteksi Turkiye guna merumuskan strategi peningkatan ekspor, yang sekaligus memiliki implikasi akademis dan kebijakan bagi pemerintah serta industri tekstil Indonesia.

Sebagian besar studi masih bersifat makro dan belum menelaah pengalaman pelaku industri tekstil, khususnya UMKM, dalam memanfaatkan skema preferensi IT-CEPA. Penelitian sebelumnya menekankan aspek diplomasi tanpa mengkaji hambatan administratif, biaya sertifikasi, pemenuhan aturan asal (ROO), serta tantangan standar teknis seperti TBT dan SPS yang memengaruhi tingkat utilisasi perjanjian. Keterbatasan ini menunjukkan perlunya kajian empiris berbasis pelaku usaha guna menjelaskan rendahnya pemanfaatan CEPA pada sektor tekstil.

Urgensi penelitian mengenai implementasi IT-CEPA pada sektor tekstil terletak pada peran strategis sektor ini sebagai penopang ekspor manufaktur Indonesia, khususnya produk HS 50–60. Meskipun pangsa ekspor ke Turkiye relatif kecil, negosiasi sejak 2017 membuka peluang perluasan pasar, penurunan tarif, dan harmonisasi *Rules of Origin* (ROO), sehingga perlu dievaluasi efektivitas serta kendala implementasinya. Selain itu, posisi strategis Turkiye yang terhubung

dengan pasar Uni Eropa melalui *Turkey–EU Customs Union* berpotensi membuka jalur rantai pasok baru bagi tekstil Indonesia dengan pemenuhan ROO yang sesuai

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Indonesia mengimplementasikan IT CEPA dalam perdagangan tekstil antara indonesia turkiye tahun 2017-2024?”

1.3 Tujuan Penelitian

Terdapat dua tujuan dalam penyusunan penelitian ini yaitu tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini yaitu sebagai tugas akhir untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Program Studi Hubungan internasional Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Tujuan Khusus

Implementasi perjanjian perdagangan internasional dapat dibangun melalui empat fondasi utama, yaitu konsep Preferential Trade Agreement (PTA) sebagai dasar pemberian preferensi tarif, ketentuan Rules of Origin (ROO) sebagai prasyarat utama untuk memperoleh manfaat preferensi, adanya hambatan non tarif (Non Tariff Measures/NTMs) seperti TBT, SPS, dan sertifikasi teknis yang membentuk

tantangan struktural dalam akses pasar, dan Trade Facilitation sebagai efisiensi logistik dan prosedur kepabeanan dijelaskan sebagai berikut :

1.4 Kerangka Pemikiran

Implementasi perjanjian perdagangan internasional dapat dibangun melalui empat fondasi utama, yaitu konsep *Preferential Trade Agreement* (PTA) sebagai dasar pemberian preferensi tarif, ketentuan *Rules of Origin* (ROO) sebagai prasyarat utama untuk memperoleh manfaat preferensi, adanya hambatan non tarif (*Non Tariff Measures/NTMs*) seperti TBT, SPS, dan sertifikasi teknis yang membentuk tantangan struktural dalam akses pasar, dan *Trade Facilitation* sebagai efisiensi logistik dan prosedur kepabeanan dijelaskan sebagai berikut :

1.4.1 *Preferential Trade Agreement* (PTA)

Preferential Trade Agreement (PTA) merupakan instrumen liberalisasi perdagangan yang memberikan pengurangan atau penghapusan tarif atas produk tertentu antarnegara mitra. Dalam kerangka *World Trade Organization* (WTO), preferensi tarif ini menciptakan akses pasar yang lebih menguntungkan dibandingkan skema *Most Favoured Nation* (MFN), sehingga meningkatkan daya saing dan volume perdagangan. Secara konseptual, PTA juga dipandang sebagai tahap awal menuju integrasi ekonomi yang lebih komprehensif, seperti CEPA .

Dalam literatur perdagangan internasional, PTA dipandang sebagai fondasi untuk mengidentifikasi hambatan tarif dan struktural yang memengaruhi arus perdagangan, khususnya pada sektor manufaktur seperti tekstil yang sensitif terhadap biaya dan rantai pasok global. Namun, PTA umumnya terbatas pada aspek

tarif dan belum mengatur secara komprehensif hambatan non-tarif seperti standar teknis, prosedur kepabeanan, dan *Rules of Origin* (ROO). Oleh karena itu, PTA sering menjadi tahap awal yang kemudian diperluas melalui perjanjian yang lebih komprehensif ..

1.4.2 Preferensi tarif (tarif reduction / tarif elimination)

Preferensi tarif dalam perjanjian seperti *Preferential Trade Agreement* (PTA), *Free Trade Agreement* (FTA), dan *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) merupakan instrumen kebijakan untuk menurunkan hambatan perdagangan melalui liberalisasi tarif. Preferensi ini berupa penurunan atau penghapusan bea masuk dibandingkan tarif MFN, sehingga menciptakan margin tarif yang menguntungkan bagi negara mitra. Studi berbasis structural gravity model menunjukkan bahwa keberadaan PTA/FTA secara signifikan meningkatkan perdagangan bilateral sebagai bentuk trade creation .

Dalam praktiknya, preferensi tarif dicantumkan dalam tariff schedules berbasis *Harmonized System* (HS) yang memuat tarif awal serta jalur liberalisasi melalui tariff reduction bertahap atau tariff elimination. Efektivitasnya ditentukan oleh selisih antara tarif MFN dan tarif preferensial; semakin besar marginnya, semakin tinggi insentif pemanfaatannya .

Dalam sektor tekstil dan pakaian jadi, preferensi tarif memiliki arti strategis karena tarif awal relatif tinggi dan rantai nilainya bersifat global. Liberalisasi tarif dapat meningkatkan perdagangan bahan baku dan produk intermediate, tetapi

manfaatnya sering dibatasi oleh ROO sektoral yang ketat serta biaya kepatuhan administratif seperti sertifikat asal dan dokumentasi rantai pasok .

Secara keseluruhan, literatur menegaskan bahwa preferensi tarif efektif menurunkan biaya perdagangan dan memperdalam integrasi ekonomi. Namun efektivitasnya sangat bergantung pada desain liberalisasi, besarnya margin tarif, serta fleksibilitas ROO. Karena itu, analisis implementasi perjanjian perdagangan khususnya di sektor tekstil perlu memperhatikan interaksi antara jadwal tarif dan ketentuan ROO dalam praktik perdagangan nyata.

1.4.3 Rules of Origin (ROO)

Rules of Origin (ROO) merupakan ketentuan teknis dalam perjanjian perdagangan yang menentukan status asal barang agar berhak memperoleh tarif preferensial. ROO memastikan bahwa manfaat liberalisasi hanya diberikan kepada produk yang diproduksi atau mengalami transformasi substansial di negara mitra. Dengan demikian, ROO berfungsi mencegah praktik *trade deflection* yang memanfaatkan tarif rendah tanpa kontribusi produksi yang signifikan (Qu Yahui et.al, 2023).

Dalam implementasinya, ROO diterapkan melalui beberapa metode penentuan asal, seperti *Regional Value Content* (RVC), *Change in Tariff Classification* (CTC) termasuk *Change in Tariff Heading* (CTH) dan *Change in Tariff Subheading* (CTSH) serta *specific process rules*. Variasi desain ini mencerminkan upaya menyesuaikan aturan asal dengan karakteristik rantai nilai sektoral dan struktur produksi lintas negara (Mitsuyo Ando et.al, 2022).

ROO tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki implikasi ekonomi terhadap perilaku perusahaan dan konfigurasi rantai pasok. Ketentuan asal memengaruhi keputusan terkait sumber bahan baku, lokasi produksi, dan strategi integrasi dalam rantai nilai global. Semakin kompleks dan ketat suatu ROO, semakin tinggi biaya kepatuhan yang harus ditanggung perusahaan, terutama dalam pencatatan asal input, perhitungan nilai tambah, dan penyediaan dokumentasi (Sagiri Kitao et.al., 2018).

Tingkat pemanfaatan preferensi tarif sangat dipengaruhi oleh biaya kepatuhan terhadap ROO. Sejumlah studi menunjukkan bahwa perusahaan cenderung tidak menggunakan fasilitas FTA apabila biaya pemenuhan aturan asal melebihi manfaat tarif, sementara margin tarif yang besar mendorong peningkatan utilisasi. Hal ini menegaskan bahwa efektivitas preferensi bergantung pada kelayakan dan fleksibilitas ROO (Qu Yahui et.al., 2023). Dalam sektor tekstil dan pakaian jadi yang terintegrasi dalam rantai nilai global, dampak ROO menjadi lebih signifikan. Ketentuan yang fleksibel dapat meningkatkan akses pasar dan kinerja ekspor, sedangkan aturan yang terlalu ketat berpotensi membatasi pemanfaatan preferensi, terutama bagi UMKM (Sytsma Tobias, 2021).

Secara keseluruhan, literatur menegaskan bahwa ROO merupakan variabel kunci dalam menilai efektivitas perjanjian perdagangan. Keberhasilan preferensi tarif bergantung pada keseimbangan antara pengendalian asal barang dan kemampuan pelaku usaha memenuhi ketentuan secara ekonomis dan administratif. Oleh karena itu, dalam sektor berantai nilai global seperti tekstil, ROO perlu

ditempatkan sebagai elemen sentral yang menghubungkan desain kebijakan dengan realisasi manfaat ekonomi.

1.4.4 Hambatan Non-Tarif (technical / regulatory barriers)

Non-Tariff Measures (NTMs) merupakan regulasi dan persyaratan teknis terhadap impor untuk melindungi konsumen, lingkungan, dan standar industri domestik. Seiring penurunan tarif melalui PTA, FTA, dan CEPA, peran NTMs semakin signifikan dalam perdagangan internasional. Instrumen ini meliputi *Technical Barriers to Trade* (TBT), *Sanitary and Phytosanitary Measures* (SPS), pelabelan, pembatasan bahan kimia, sertifikasi, serta prosedur kepabeanan. Meskipun bertujuan menjaga kualitas dan keamanan, NTMs dapat menimbulkan biaya kepatuhan tambahan, terutama pada sektor tekstil yang berkaitan dengan standar bahan kimia, pelabelan komposisi, dan sertifikasi mutu .

Ketidakpatuhan terhadap NTMs dapat mengakibatkan penolakan produk di perbatasan atau penundaan pemeriksaan yang meningkatkan biaya dan waktu distribusi. Dari perspektif bisnis, NTMs memengaruhi strategi operasional perusahaan, termasuk kebutuhan investasi pada peningkatan kualitas produksi, penguatan *quality control*, penyesuaian rantai pasok, serta pemenuhan sertifikasi teknis. Proses uji laboratorium, audit, dan administrasi kepatuhan berdampak pada lead time, arus kas, dan daya saing harga di pasar internasional .

1.4.5 Trade Facilitation

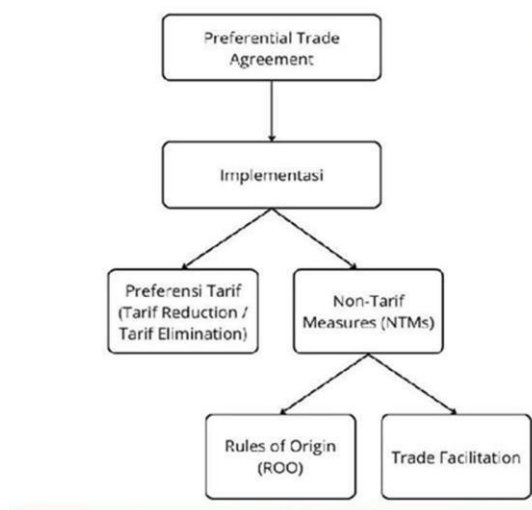
Trade facilitation merupakan upaya menyederhanakan dan mempercepat prosedur perdagangan lintas batas melalui reformasi administrasi, modernisasi kepabeanan, dan digitalisasi layanan. Instrumennya meliputi dokumen elektronik,

single window, manajemen risiko, harmonisasi dokumen, serta koordinasi antarotoritas. Tujuannya adalah menekan biaya transaksi, mempercepat arus barang, dan mengurangi ketidakpastian regulasi. Prosedur yang masih manual dan berlapis berpotensi meningkatkan biaya, waktu tunggu, dan gangguan rantai pasok.

Keterbatasan trade facilitation dapat mengurangi efektivitas preferensi tarif apabila proses logistik dan kepabeanan masih lambat dan tidak pasti. Dalam sektor tekstil, efisiensi pengiriman dan kepastian prosedur menjadi faktor penting bagi daya saing. Penundaan verifikasi dokumen meningkatkan biaya penyimpanan, risiko keusangan, dan tekanan harga. Oleh karena itu, trade facilitation berpengaruh langsung terhadap strategi rantai pasok dan respons industri terhadap dinamika pasar global .

Bagi pelaku usaha, khususnya usaha kecil dan menengah, kualitas trade facilitation menentukan kemampuan memanfaatkan preferensi tarif secara efektif. Tanpa sistem logistik dan administrasi yang efisien, penurunan tarif dan pemenuhan aturan asal tidak cukup menjamin akses pasar. Oleh karena itu, trade facilitation dipandang sebagai variabel struktural dalam implementasi perjanjian perdagangan, karena keberhasilannya bergantung pada kemampuan prosedur perbatasan mendukung arus barang yang cepat, transparan, dan efisien .

1.5 Sintesa Pemikiran



Gambar 1. 3 Konsep Preferential Trade Agreement (PTA)

Sumber : Penulis

Sintesis pemikiran ini menunjukkan bahwa *implementasi Preferential Trade Agreement* (PTA) diwujudkan melalui dua instrumen utama, yaitu tarif dan non-tarif. Pada sisi tarif, PTA direalisasikan melalui *tariff reduction* atau *tariff elimination* untuk menurunkan bea masuk produk mitra. Sementara itu, pada sisi non-tarif, implementasi mencakup *Non-Tariff Measures* (NTMs) seperti *Rules of Origin* (ROO) dan *trade facilitation* yang tidak memengaruhi besaran tarif secara langsung, tetapi menentukan akses, kepatuhan, dan kelancaran pemanfaatan preferensi. Dengan demikian, efektivitas PTA bergantung pada interaksi simultan antara instrumen tarif dan non-tarif.

1.6 Argumen utama

Sintesis pemikiran ini menunjukkan bahwa implementasi *Preferential Trade Agreement* (PTA) diwujudkan melalui dua instrumen utama, yaitu tarif dan non-tarif. Pada sisi tarif, PTA direalisasikan melalui tariff reduction atau tariff elimination untuk menurunkan bea masuk produk mitra. Sementara itu, pada sisi non-tarif, implementasi mencakup *Non-Tariff Measures* (NTMs) seperti ruls) dan trade facilitation yang tidak memengaruhi besaran tarif secara langsung, tetapi menentukan akses, kepatuhan, dan kelancaran pemanfaatan preferensi. Dengan demikian, efektivitas PTA bergantung pada interaksi simultan antara instrumen tarif dan non-tarif.

1.7 Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini dibagi menjadi lima bagian yaitu tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1.7.1 Tipe penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang di teliti menjadi variabel yang saling berkaitan (Sulistiyo, U., 2023). Dalam penelitian ini penelitian deskriptif digunakan untuk mendapatkan pengetahuan mengenai Implementasi IT CEPA dalam peningkatan perdagangan tekstil tahun 2017-2024.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Untuk membatasi jangkauan penelitian, peneliti memilih jangka waktu selama 7 tahun, tahun terhitung sejak tahun 2017 hingga 2024. Tahun 2017 dipilih

karena pada tahun tersebut kedua negara mulai mengkonsolidasikan substansi kerja sama dan menyiapkan fondasi operasional CEPA, sementara hingga 2024 telah tersedia perkembangan regulasi, dinamika perdagangan, dan indikator implementasi yang cukup untuk dievaluasi. Periode ini juga memberikan cakupan waktu yang memadai untuk menilai bagaimana perubahan kebijakan, kesiapan pelaku usaha, serta penyesuaian teknis mempengaruhi kelayakan dan efektivitas implementasi CEPA dalam perdagangan tekstil.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif deskriptif melalui studi pustaka. Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan seperti buku, jurnal ilmiah, laporan resmi, dokumen kebijakan, dan publikasi media. Menurut Sugiyono (2019), studi pustaka merupakan metode yang digunakan peneliti untuk memperoleh landasan teori, konsep, serta informasi yang relevan dengan topik penelitian melalui penelusuran sumber-sumber tertulis. Melalui teknik ini, peneliti tidak melakukan pengumpulan data langsung di lapangan, melainkan memanfaatkan data sekunder yang telah disusun dan dipublikasikan oleh pihak lain.

Tabel 1. 2 Tabel Pengumpulan Data Instrumen Tarif

Jenis Data	Sumber Data
Ketentuan tarif tekstil (MFN & preferensial)	Dokumen perjanjian dagang
Jadwal penurunan/penghapusan tarif	Basis data tarif internasional
Pos tarif tekstil (HS 52, 54, 61, 62, 63)	Statistik dan klasifikasi perdagangan

Sumber : Penulis

Catatan : Dirangkum oleh penulis berdasarkan sumber-sumber di atas

Tabel 1. 3 Tabel Pengumpulan Data Instrumen Non-Tarif

Komponen ROO	Sumber
Ketentuan non-tarif dalam PTA (ROO & NTMs)	Dokumen perjanjian dagang
Prosedur kepabeanan & fasilitasi perdagangan	Regulasi dan pedoman perdagangan
Persyaratan teknis dan administratif tekstil	Regulasi negara tujuan

Sumber : Penulis

Catatan : Dirangkum oleh penulis berdasarkan sumber-sumber di atas

1.7.4 Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis yang berupa metode kualitatif. Metode kualitatif sendiri dalam penelitian yakni metode yang berfokus pada pengamatan kasus yang dalam dan tidak berfokus dengan nilai atau angka dengan cara menganalisis data, mengumpulkan data yang relevan dengan kasus, dan merumuskan hasil studi. Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian

memahami fenomena manusia dengan menciptakan gambaran menyeluruh yang disajikan dengan kata-kata yang dilakukan dengan pengaturan alamiah (Ak, W. W., & Za, T., 2015).

1.7.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini, yaitu :

BAB I

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, sintesa pemikiran, argumentasi, metodologi penelitian dan juga sistematika penelitian.

BAB II

Pada bab ini menjelaskan mengenai implementasi PTA poin hambatan preferensi tarif (tarif reduction / tarif elimination).

BAB III

Pada bab ini menjelaskan tentang implementasi PTA poin hambatan *non tariff measures* (NTMS), *Rules of Origin*, dan *Trade facilitation* dalam *implementasi Indonesia Turkiye comprehensive economic partnership agreement* (IT-CEPA) dalam peningkatan perdagangan tekstil.